

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG - UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MEDAN)

OLEH

EDINTON LUBIS

NPM : 08 840 0180

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pelaksanaan penelitian dilakukan terhadap suatu objek hukum atau orang yang dituduh melakukan perbuatan korupsi serta bagaimana sistem pembuktian diterapkan dalam menuduh seseorang tersebut korupsi sesuai yang diatur dalam undang - undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHPidana.

Untuk mengentengahkan pembahasan di atas, maka diajukan rumusan masalah bagaimana kajian hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil sesuai dengan yang diatur dalam Undang - Undang.

Pelaksanaan penelitian dalam skripsi ini dilakukan secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada pengadilan negeri Medan dengan cara mengambil kasus sebagai telaah yang selanjutnya akan dianalisis.

Pelaksanaan penelitian dalam skripsi ini dilakukan secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada pengadilan Negeri Medan dengan cara pengambilan kasus sebagaimana telah yang selanjutnya akan dianalisis. Dalam hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan tersebut maka diketahui pengertian tindak pidana korupsi menurut UU Nomor 20 Tahun 2001 dimuat dalam rumusan pasal 1 ayat 2, para sarjana memberikan pengertian tindak pidana korupsi yang ditinjau dari beberapa segi antara lain rumusan menurut perkembangan ilmu - ilmu sosial, rumusan yang menekankan pada jabatan dalam pemerintah, rumusan korupsi yang dihubungkan dengan teori dasar dan rumusan yang berorientasi kepada kepentingan umum. Berdasarkan bunyi pasal 1 ayat 1 UUTPK, maka pelakunya dalam tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh pegawai negeri, bukan pegawai negeri dan yang dilakukan oleh pegawai negeri bersama - sama dengan yang bukan pegawai negeri dan pengertian pegawai negeri dalam UU No 20 Tahun 2001 adalah merupakan perluasan pengertian pegawai negeri menurut pasal 92 KUHP dan Undang - Undang pokok kepegawaian UU NO. 43 Tahun 1999. Dengan demikian pengertian pegawai negeri menurut UU No. 20 Tahun 2001 telah berlapis 3 yaitu (1) Pegawai negeri menurut pasal 92 (2) pegawai negeri menurut UU No 43 Tahun 1999 dan (3) pegawai negeri menurut pasal 2 UU No 20 Tahun 2001. Pertanggungjawaban pidana digambarkan dengan adanya unsur kesalahan pada pelaku atau dengan kata lain bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana yang dian dipidana.

UNIVERSITAS MEDAN AREA